

## Ada Penipu Menyamar Jadi Wali Kota Bogor

**BOGOR (IM)** - Seorang penipu membuat akun WhatsApp yang mengatasnamakan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto. Akun palsu itu menggunakan nomor WhatsApp 083131541654. Si pemilik akun juga menggunakan foto profil Bima Arya.

Teman Aksi Komunikasi dan Informasi Siber (Takis) Kota Bogor dalam postingan di Instagramnya @takiskotabogor menyampaikan, akun WhatsApp tersebut bukan milik Wali Kota Bogor. "Setelah pemeriksaan fakta, ternyata akun WhatsApp tersebut bukanlah kepunyaan Wali Kota Bogor, melainkan milik seorang penipu yang berpura-pura menjadi Wali Kota Bogor.

Oleh karena itu, penting bagi penduduk Kota Bogor untuk selalu menjaga kewaspadaan jika menerima pesan yang mengklaim sebagai Walikota Kota Bogor," tulis Takis Kota Bogor dalam postingannya, yang dikutip, Selasa (17/10).

Bima Arya Takis Kota Bogor juga membagikan screenshot isi pesan yang dikirim si pemilik akun kepada calon korbannya. Dalam screenshot tersebut tertulis pesan: "Assalamualaikum. Melanjutkan percakapan tadi pak. Tolong bisa dikirimkan untuk foto-foto pembangunan masjidnya." Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bogor, Rahmat Hidayat memastikan, akun tersebut milik seorang penipu yang mengaku se-

bagai Wali Kota Bogor. Rahmat mengatakan, akun WhatsApp palsu Bima Arya itu pertama kali dilaporkan kepada dirinya pada Minggu (15/10). "Saat itu ada seorang warga yang lapor ke saya menanyakan soal nomor WhatsApp itu. Kemudian saya cek, dan dipastikan itu bukan punya Pak Wali Kota. Sebab, nggak mungkin Wali Kota kirim pesan WA ke warganya satu-satu," sebut Rahmat, saat dikonfirmasi.

Rahmat menyampaikan, kasus penipuan semacam ini juga pernah terjadi di Bulan Agustus 2023. Si penipu, sambungnya, menipu salah satu pengurus DKM masjid. Modusnya, lanjut Rahmat, sama persis yaitu berpura-pura akan memberikan bantuan untuk pembangunan masjid. Namun, pelaku meminta untuk dikirimkan sejumlah uang untuk biaya pengurusan.

"Modus ini pernah terjadi sebelumnya. Pakai akun WhatsApp palsu Wali Kota, bahkan sampai ada korban salah satu pengurus DKM mentransfer uang kepada pelaku," bebarnya. "Karena khawatir nanti ada warga yang sampai tertipu lagi, makanya kita share informasi ini lewat Instagram Takis yang dikelola oleh Diskominfo," pungkask dia. ● yan

## Bupati Iwan Setiawan Ingatkan Kades Harus Jaga Demokrasi



Bupati Bogor, Iwan Setiawan minta Kades menjaga demokrasi.

**BOGOR (IM)**-Bupati Bogor, Iwan Setiawan melantik Kepala Desa (Kades) Citapen masa bakti tahun 2023-2025, Devi Yulianti, di Aula Kantor Kecamatan Ciawi, Senin (16/10).

Pada kesempatan tersebut Iwan Setiawan mengingatkan, kades harus menjaga demokrasi di wilayahnya masing-masing.

Pelantikan Kepala Desa Citapen Kecamatan Ciawi tersebut hasil dari Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu. Hadir mendampingi Bupati Bogor, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Aspemkesra), Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Camat Ciawi, jajaran Forkopimcam dan Kepala Desa se-Kecamatan Ciawi, Ketua BPD, Ketua Panitia PAW, serta tokoh masyarakat setempat.

Bupati Bogor, Iwan Setiawan mengungkapkan, kepala desa yang hari ini dilantik dan diambil sumpahnya, yang pertama adalah untuk menjaga NKRI dan ideologi Pancasila. Selanjutnya ia menekankan agar kades menjaga demokrasi di wilayahnya. Terlebih menjelang suksesi Pemilu dan Pilkada tahun 2024, yang dinamikanya sudah terlihat dari sekarang.

"Kades harus terdepan menjaga demokrasi, memfasilitasi, merangkul, membina, mengayomi seluruh peserta pesta demokrasi. Pelayanannya harus sama kepada seluruh peserta Pemilu dan Pilkada, tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih, dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu

aturan yang berlaku, agar tidak ada kegaduhan," ungkap Iwan Setiawan.

Kades harus terdepan menjaga demokrasi, memfasilitasi, merangkul, membina, mengayomi seluruh peserta pesta demokrasi. Pelayanannya harus sama kepada seluruh peserta Pemilu dan Pilkada, tidak boleh membeda-bedakan atau pilih kasih, dengan tetap berpedoman pada rambu-rambu aturan yang berlaku, agar tidak ada kegaduhan," ungkap Iwan Setiawan.

Iwan juga menegaskan, layani seluruh warga Desa Citapen dengan baik, jadilah negarawan, rangkul seluruh warga desa rekatkan kembali masyarakat yang terpolarisasi. Karena sifat negarawan adalah mampu merangkul seluruh pihak baik yang mendukung maupun tidak mendukung pada saat pemilihan Kepala Desa yang lalu.

"Berikutnya, saya juga titip program Samisade harus berjalan dengan baik untuk membangun infrastruktur desa. Kelola anggaran desa dengan baik, profesional, dan transparan," tandas Iwan Setiawan.

Iwan mengucapkan selamat Kades Citapen yang sudah dilantik, semoga dapat melaksanakan tugas dengan amanah, menjalankan pemerintahan desa dengan baik, memberdayakan, membina masyarakat agar semakin maju mandiri dan sejahtera. Ia juga meminta seluruh pihak untuk mendukung agar Desa Citapen lebih maju. ● gio

# 8 | Nusantara



## BANDUNG PHOTOGRAPHY MONTH

Warga melintas di samping karya foto yang dipamerkan pada ajang Bandung Photography Month di pedestrian Jalan Asia Afrika, Bandung, Jawa Barat, Selasa (17/10). Pameran yang diselenggarakan oleh Yayasan Raws Syndicate Indonesia tersebut diikuti oleh ratusan fotografer dari berbagai kota di Indonesia dan berbagai negara di Asia yang mengusung tema Kembang, Asia Afrika, dan Ruangannya.

GELAR APEL OPERASI MANTAP BRATA LODAYA

## Miliki 4 Juta DPT, Kabupaten Bogor Rawan Penyelenggaraan Pemilu

Pemilu di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor terbilang sangat rawan, hingga anggota harus selalu siaga akan potensi kerawannya hingga siap dalam mengantisipasi potensi tersebut," ucap Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro.

**CIBINONG (IM)**- Forkopimda Kabupaten Bogor melaksanakan apel gelar pasukan, terkait Operasi Mantap Brata Lodaya yang berlangsung sejak Bulan Oktober 2023 hingga akhir tahun 2024.

Polres Bogor, mengerahkan 1.105 personelnya untuk pengamanan pemilihan umum (Pemilu) 2024, yang akan ditempatkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) rawan kerucuhan.

"Pemilu di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Bogor terbilang

sangat rawan, hingga anggota harus selalu siaga akan potensi kerawannya hingga siap dalam mengantisipasi potensi tersebut," ucap Kapolres Bogor, AKBP Rio Wahyu Anggoro kepada wartawan, Selasa (17/10).

AKBP Rio Wahyu Anggoro menuturkan bersama TNI dan stekholder terkait, akan menciptakan situasi yang kondusif, aman, damai dan lancar.

**Memiliki 4 Juta DPT**  
Kapolres Bogor, AKBP

Rio Wahyu Anggoro menyebut Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang rawan pada saat penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu).

Menurut Rio, Jawa Barat (Jabar) yang memiliki penduduk lebih dari 50 juta jiwa menandai catatan tersendiri bagi Polri dalam indeks kerawanan pada saat penyelenggaraan Pemilu. "Khusus Kabupaten Bogor penduduknya hampir 6 juta jiwa dengan DPT hampir 4 juta. Kami mengatakan semua rawan, agar anggota tidak underestimate tidak ada kami berpikir aman. Kami berpikir semua sangat rawan agar kami bisa menjaga masyarakat dengan hati yang tulus dan ikhlas," ujarnya.

Dari 1.500 personel, sedikitnya ada 1.105 anggota Polres Bogor akan diterjunkan ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan untuk menjaga kondusifitas wilayah. "Kita akan konsen di situ agar dukungan logistik, pencob-

losan segala macam aman dan terkendali," ucapnya.

Selain itu, Rio pun menyebut telah membentuk tim patroli cyber yang berpusat di Mabes Polri. "Jadi segala bentuk apa yang ada di medsos nanti dari mabes Polri akan melakukan komunikasi kepada kapolres untuk dilakukan penegakkan hukum," ucapnya.

Untuk masyarakat, Rio berharap dapat mencerna dan memfilter setiap informasi yang diterima, jangan langsung didistribusikan kepada masyarakat lain jika belum dipastikan kebenarannya. "Jangan asal forward atau segala macam, tolong dijaga semua. Kalau masyarakat semua ikut turut serta (asal forward) itu tidak baik," kata Rio.

Pada pelaksanaan Pemilu 2024 ini, polisi akan memonitor semua informasi yang ada di setiap media sosial.

"Jika ada informasi hoax, (laporan) langsung ke Polres

gapapa. Apapun setiap hal yang di forward dan share melalui hp akan dipantau langsung oleh tim cyber yang dibentuk oleh pak kapolri," terangnya.

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor, Sri Kuncoro berharap, walaupun sudah siap mengantisipasi, dirinya berharap situasi di Bumi Tegar Beriman berlangsung kondusif, aman, damai dan lancar. "Semoga Pemilu 2024 tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan," harap Sri Kuncoro.

Komandan Kodim 0621 Kabupaten Bogor, Letkol (Kav) Gan Gan Ruscandara siap membantu pendistribusian logistik Pemilu hingga ke titik-titik yang tidak bisa terjangkau oleh kendaraan roda empat. "Logistik Pemilu harus sampai di setiap TPS, lalu pasca pencoblosan suaranya juga harus dikawal hingga dikumpulkan ke kecamatan hingga Gudang KPU Kabupaten Bogor," tukas Letkol (Kav) Gan Gan Ruscandara. ● gio

## PKK Kab. Bogor Salurkan 60 Ribu Telur ke Kecamatan Intervensi Stunting

**BOGOR (IM)**- Tim Pengerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kabupaten Bogor bekerjasama dengan Perumda Air Minum Tirta Kahuripan menyerahkan bantuan 60 ribu telur kepada 12 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Ini merupakan langkah awal dan tidak hanya berhenti di sini, insya Allah akan terus berlanjut demi kesejahteraan masyarakat. Acara dihadiri pengurus TP PKK Kabupaten Bogor dan para Ketua PKK Kecamatan. Bantuan diserahkan secara simbolis Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Halimatuz Sadiyah Iwan dan Direktur Umum Perumda Tirta Kahuripan, Abdul Somad kepada Ketua TP PKK Kecamatan Caringin. Bantuan berasal dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) Perumda Tirta Kahuripan.

Kecamatan yang mendapatkan bantuan di antaranya Cisarua, Cibungbulang, Pamijahan, Leuwiliang, Jasinga, Caringin, Leuwisadeng, Sukamakmur, Klapanunggal, Sukaraja, Cigudeg, dan Sukajaya.

Ketua TP PKK Kabupaten Bogor, Halimatuz Sadiyah

Iwan mengungkapkan, terima kasih kepada Perumda Air Minum Tirta Kahuripan yang sudah memfasilitasi bantuan ini untuk diberikan kepada lokasi stunting sebanyak 12 kecamatan di Kabupaten Bogor.

Terima kasih sudah mempercayai PKK Kabupaten Bogor untuk menyalurkan bantuan ini, di mana Ketua PKK mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan, hingga ke desa merupakan ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (IPPS) di wilayahnya masing-masing," ungkap Halimatuz Sadiyah.

Halimatuz Sadiyah menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Bogor saat ini sedang gencar dalam upaya penanganan stunting demi mewujudkan zero stunting di Kabupaten Bogor. Bantuan telur ini nantinya tidak hanya diberikan kepada anak yang terindikasi stunting, tapi juga kepada ibu hamil.

"Semoga penyaluran 60 ribu butir telur kepada ket-

ua PKK kecamatan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat kita dalam rangka perbaikan gizi, dan upaya pencegahan stunting yang ada di wilayah Kabupaten Bogor. Karena telur memiliki kandungan protein yang tinggi bagi balita untuk meningkatkan berat badan dan tinggi badan," jelasnya

Selanjutnya, Direktur Umum Perumda Air Minum Tirta Kahuripan, Abdul Somad menerangkan, pihaknya percaya PKK Kabupaten Bogor bisa mendistribusikan bantuan ini untuk masyarakat, khususnya dalam program percepatan penurunan stunting. Karena PKK juga sedang fokus dalam kegiatan penurunan stunting.

"Mudah-mudahan bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat, kami sangat terbuka kepada PKK Kabupaten Bogor, ketika ada kebutuhan lain, kita bisa bekerjasama. Jadi kami berharap kerjasama ini tidak hanya terbatas di program stunting saja namun bisa di program lainnya untuk kepentingan masyarakat," terang Abdul Somad. ● gio



Ketua PKK Kabupaten Bogor dan Dirum PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor bagi-bagi telur.

## Bima Arya Ibaratkan Putusan MK Buka Jalan Tol Kepala Daerah 'Nyapres'

**BOGOR (IM)**- Wali Kota Bogor yang juga Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN, Bima Arya mengibaratkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan umum (pemilu) 2024 berusia 40 tahun atau pernah dan sedang menjadi kepala daerah ke dalam dua analogi.

Bima Arya sebagai politisi yang juga dekat dengan tokoh-tokoh muda, saat diwawancara usai menjadi pemimpin apel gelar pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 di lapangan GOR Pajajaran, Bogor, Selasa (17/10), mengatakan pertama, putusan MK soal batas usia dan pengalaman kepala daerah sebagai capres dan cawapres ibarat membuka jalan tol bagi kepala daerah untuk menuju kepemimpinan nasional.

"Putusan MK ini kan ibarat membuka jalan tol bagi kepala daerah untuk menuju kepemimpinan nasional. Jadi kepala daerah itu walaupun usianya masih muda dan masa jabatannya belum lama, tapi bisa 'nyapres' atau cawapres begitu," kata Bima.

Tetapi ibarat pendaftaran penerimaan peserta didik baru (PPDB), lanjut Bima, putusan MK itu seperti jalur prestasi bagi siswa-siswa tertentu, kalau punya prestasi tertentu bisa diterima masuk sekolah tertentu.

"Ini pun begitu, kepala daerah yang dianggap pengalaman dan mungkin dianggap berprestasi bisa 'nyapres'. Pertanyaannya adalah bagaimana mengukur pengalaman? Bagaimana mengukur prestasi? Itu pertanyaannya," ujar Bima.

Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa putusan mahkamah terkait

uji materi Pasal 169 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berlaku mulai Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.

MK mengabulkan sebagian permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengenai batas usia capres dan cawapres diubah menjadi berusia 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah.

Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 itu diajukan oleh perscorongan warga negara Indonesia (WNI) bernama Almas Tsaqibbirru Re A yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah.

Mahkamah berkesimpulan bahwa permohonan pemohon beralsan menurut hukum untuk sebagian. Oleh sebab itu, MK menyatakan Pasal 169 huruf (g) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan UUD NRI 1945.

Di sisi lain, MK menolak gugatan uji materi yang dilayangkan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang memohon batas usia capres dan cawapres menjadi 35 tahun.

Kemudian, MK juga menolak gugatan uji materi Partai Garuda dan sejumlah kepala daerah yang memohon batas usia capres-cawapres diubah menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara.

Atas putusan MK itu, Bima pun menuturkan, soal peluang Gibran sebagai kepala daerah dan politisi muda menjadi cawapres Prabowo Subianto atas putusan MK akan tergantung dari kesepakatan pimpinan-pimpinan partai Koalisi Indonesia Maju (KIM). ● yan